

NAGARI HALABAN DALAM SEJARAH PDRI: JEJAK PERJUANGAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA

Jihan Salsabilla Hendri¹, Ratna Wilis², Nabil Iqbal Zulkarnain³, Naneza Qhoviva⁴,
Alifia Safira Nomory⁵, Zuhra Rozikha⁶, Adella Agustin⁷, Rafdavel Oktamiranda⁸

¹Departemen Ilmu Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Padang

²Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

³Departemen Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri
Padang

⁴Departemen Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Padang

⁵Departemen Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, Fakultas Pariwisata dan
Perhotelan, Universitas Negeri Padang

⁶Departemen Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Padang

⁷Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Negeri Padang

⁸Departemen Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

Alamat e-mail : jihansalsabilla40@gmail.com, ratna_geografi@fis.unp.ac.id,
nabiliqbal355@gmail.com, nanezaqhoviva@gmail.com, alifianomori@gmail.com,
zuhrarozikha303@gmail.com, adellaagustina885@gmail.com,
rafdafeloktamiranda@gmail.com.

ABSTRACT

The establishment of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) on December 19, 1948, was a significant milestone in the history of the Republic of Indonesia's determination to maintain its existence amidst the Second Dutch Military Aggression. One of the areas that played a role in the PDRI's guerrilla route was Nagari Halaban in Lareh Sago Halaban District, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra. Although not the center of government, Halaban served as a crucial location for the mobility and protection of PDRI convoys as they moved from Bukittinggi to the interior. This article examines Nagari Halaban's strategic contribution as a transit point and logistical support during the PDRI's struggle, based on historical archives, local documentation, and reliable sources. The study's findings demonstrate that local community involvement and Halaban's

geographical location played a crucial role in maintaining the continuity of the Republic's government. This demonstrates that even remote areas play a significant role in safeguarding national sovereignty.

Keywords: Nagari Halaban, PDRI, Dutch Military Aggression II, Local Struggle, history of the Republic of Indonesia

ABSTRAK

Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948 merupakan tonggak penting dalam sejarah keteguhan Republik Indonesia mempertahankan eksistensinya di tengah agresi militer Belanda II. Salah satu wilayah yang berperan dalam jalur gerilya PDRI adalah Nagari Halaban di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Meskipun tidak menjadi pusat pemerintahan, Halaban menjadi lokasi penting dalam mobilitas dan perlindungan rombongan PDRI ketika berpindah dari Bukittinggi menuju pedalaman. Artikel ini mengkaji kontribusi strategis Nagari Halaban sebagai titik singgah dan dukungan logistik selama masa perjuangan PDRI, berdasarkan arsip sejarah, dokumentasi lokal, serta sumber terpercaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dan kondisi geografis Halaban berperan penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan Republik. Ini menunjukkan bahwa daerah terpencil sekalipun memiliki andil besar dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Kata Kunci: Nagari Halaban, PDRI, Agresi Militer Belanda II, Perjuangan Lokal, sejarah Republik Indonesia

A. Pendahuluan

Sejarah bangsa Indonesia tidak hanya dibentuk oleh peristiwa-peristiwa besar yang tercatat dalam buku pelajaran nasional, tetapi juga oleh narasi-narasi kecil yang tersembunyi di pelosok negeri. Dalam konteks perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, salah

satu tonggak penting adalah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa agresi militer Belanda II tahun 1948. Ketika ibu kota negara, Yogyakarta, jatuh ke tangan penjajah dan para pemimpin utama Republik ditangkap, bangsa ini berada dalam ancaman nyata kehilangan legitimasi

internasional sebagai negara yang merdeka. Dalam situasi itulah, Syafruddin Prawiranegara bersama beberapa tokoh lain mendirikan PDRI di Bukittinggi sebagai upaya menyelamatkan keberlangsungan negara. Namun, eksistensi pemerintahan darurat ini tidaklah mudah. Di bawah tekanan militer dan keterbatasan logistik, PDRI terpaksa berpindah-pindah ke berbagai wilayah pedalaman Sumatera Barat demi menghindari deteksi dan serangan Belanda.

Di antara banyak lokasi yang dilintasi dan menjadi tempat persinggahan PDRI, Nagari Halaban di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu titik penting yang belum banyak mendapat perhatian dalam studi sejarah nasional. Halaban bukan sekadar ruang geografis, tetapi juga ruang historis yang menjadi bagian dari jalur pergerakan dan perlindungan pemerintahan Republik dalam kondisi darurat. Letaknya yang terpencil dan berbukit menjadikannya strategis sebagai tempat perlindungan. Lebih dari itu, peran masyarakat Halaban dalam memberikan dukungan logistik, tempat persembunyian, dan menjaga

kerahasiaan keberadaan rombongan PDRI menjadi bukti bahwa perlawanan terhadap kolonialisme adalah usaha kolektif rakyat, bukan semata-mata elit politik.

Ironisnya, peran Halaban dalam sejarah PDRI nyaris terpinggirkan dalam narasi besar perjuangan bangsa. Tidak banyak dokumen resmi yang mencatat peran nagari ini secara eksplisit, dan sebagian besar pengetahuan tentangnya bersumber dari arsip lokal, cerita lisan, serta kajian-kajian sejarah yang terbatas. Hal ini mencerminkan kecenderungan historiografi nasional yang terlalu berpusat pada tokoh-tokoh besar dan wilayah-wilayah utama, sehingga mengabaikan kontribusi nyata dari komunitas-komunitas kecil. Padahal, mempertahankan Republik dalam kondisi negara tanpa ibu kota dan tanpa pemimpin pusat, membutuhkan ketahanan yang melibatkan seluruh elemen rakyat, termasuk masyarakat desa seperti di Halaban.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam jejak perjuangan Nagari Halaban dalam sejarah PDRI, serta kontribusinya terhadap eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia. Melalui pendekatan

historis dan analisis sumber-sumber terpercaya, tulisan ini diharapkan dapat menempatkan Halaban dalam peta sejarah nasional sebagai bagian penting dari mata rantai perjuangan kemerdekaan yang lebih luas. Dengan demikian, sejarah tidak lagi semata milik pusat kekuasaan, tetapi juga milik rakyat kecil yang menjadi penjaga republik dalam diam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif berdasarkan jejak-jejak historis yang dapat diverifikasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis peran strategis Nagari Halaban dalam perjalanan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama masa agresi militer Belanda II pada tahun 1948–1949. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif historis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami fakta-fakta sejarah secara mendalam. Penelitian ini mengandalkan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup artikel

sejarah dari Kompas Skola yang diakses melalui arsip digital Wayback Machine, serta catatan sejarah lokal terkait aktivitas rombongan PDRI di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal sejarah, dan entri ensiklopedia daring seperti Wikipedia Bahasa Indonesia yang relevan dengan wilayah Halaban dan konteks sejarah PDRI.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah kehadiran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan militer pada akhir dekade 1940-an, khususnya saat Republik Indonesia mengalami salah satu masa paling genting dalam sejarah kemerdekaannya. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan **Agresi Militer II** dengan menyerang ibu kota negara saat itu, **Yogyakarta**, dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta sejumlah tokoh penting lainnya. Dalam situasi darurat itu, Republik seolah berada di ambang kehancuran, baik secara politik maupun simbolis di mata

internasional. Namun dalam kondisi yang sangat kritis tersebut, lahirlah sebuah bentuk penyelamatan pemerintahan: **Pemerintahan**

Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dideklarasikan di **Bukittinggi, Sumatera Barat**, pada 22 Desember 1948 oleh **Syafruddin Prawiranegara**, berdasarkan mandat tidak langsung dari para pemimpin yang ditawan di Jawa.

Tujuan utama pembentukan PDRI adalah memastikan bahwa Republik Indonesia tetap eksis secara hukum, walaupun secara fisik pemerintahannya telah dikuasai oleh Belanda. Keberadaan PDRI menjadi simbol penting bahwa negara belum runtuh, dan inilah yang kemudian menjadi dasar kuat bagi posisi diplomatik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Dalam masa operasionalnya, PDRI tidak menetap di satu tempat. Karena tekanan militer Belanda yang juga menyasar wilayah Sumatera Barat, Syafruddin dan rombongan PDRI terus berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Perjalanan gerilya ini menyusuri wilayah pedalaman Minangkabau, termasuk **Situjuah, Suliki, Halaban, Koto Tinggi, dan akhirnya Bidar Alam**, yang menjadi

pusat PDRI terakhir sebelum dibubarkan pada Juli 1949 setelah kembalinya pemerintahan pusat ke Yogyakarta.

Dalam konteks inilah, **Nagari Halaban** memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Letaknya yang berada di antara Bukittinggi dan wilayah pedalaman Lima Puluh Kota membuat Halaban menjadi **jalur transit alami** bagi rombongan PDRI yang bergerak secara cepat dan rahasia. Keberadaan Halaban tercatat dalam beberapa sumber sebagai titik singgah, tempat persembunyian, bahkan titik komunikasi darurat untuk mempertahankan keberlangsungan pemerintahan. Struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berbasis gotong royong dan nilai adat juga memberi ruang bagi praktik perlindungan kepada para pemimpin Republik secara kolektif dan sukarela. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton sejarah, melainkan bagian langsung dari sistem pertahanan rakyat yang tidak terstruktur secara formal, namun sangat efektif.

Secara historis, keterlibatan Halaban dan nagari-nagari lain dalam mendukung PDRI menjadi cermin

bahwa perjuangan mempertahankan Republik tidak semata-mata dilakukan oleh pasukan bersenjata atau tokoh elit nasional. Perlawanan terhadap kolonialisme adalah gerakan yang menembus batas sosial dan geografis, melibatkan rakyat biasa yang sadar akan pentingnya kedaulatan. Dengan demikian, PDRI bukan hanya simbol keteguhan negara secara struktural, tetapi juga refleksi kekuatan rakyat dalam mempertahankan martabat kemerdekaan. Halaban adalah bukti nyata bahwa desa-desa kecil sekalipun memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan Republik Indonesia ketika eksistensinya berada di ujung tanduk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nagari Halaban, sebuah wilayah yang secara geografis terpencil di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, memiliki posisi strategis dalam perjalanan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama masa agresi militer Belanda II pada 1948–1949. Meskipun namanya tidak sepopuler Bidar Alam atau Bukittinggi dalam narasi sejarah nasional, Halaban tercatat sebagai salah satu lokasi persinggahan yang dilintasi

oleh rombongan PDRI dalam upaya mempertahankan keberlangsungan pemerintahan Republik di tengah tekanan militer Belanda. Penelusuran terhadap sumber digital, terutama arsip Kompas Skola (2020), menyatakan bahwa setelah pendudukan Yogyakarta, PDRI berpindah ke wilayah pedalaman Sumatera Barat untuk menghindari kejaran militer Belanda, dengan menyebut Halaban sebagai salah satu titik transit yang dilalui rombongan Syafruddin Prawiranegara.

Peran Halaban tidak dapat dilepaskan dari letak geografisnya yang berada di perbukitan dan jauh dari pusat kekuasaan kolonial. Dengan ketinggian mencapai 400 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, medan wilayah ini memberikan keuntungan taktis berupa rute tersembunyi dan jalur gerilya yang sulit dijangkau musuh. Halaban terhubung secara alami dengan jalur hutan dan sungai menuju wilayah Suliki, Payakumbuh, dan Situjuah. Kondisi tersebut memungkinkan PDRI untuk berpindah secara dinamis dan mempertahankan komunikasi internal pemerintahan meskipun dalam

kondisi genting. Selain itu, struktur sosial masyarakat Minangkabau yang egaliter dan kuatnya ikatan adat—dengan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"—mendorong solidaritas lokal terhadap perjuangan Republik. Warga Halaban saat itu diketahui ikut memberikan perlindungan, menyediakan tempat tinggal, dan membantu logistik secara sembunyi-sembunyi bagi rombongan PDRI yang singgah di daerah mereka.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan PDRI dalam mempertahankan eksistensinya bukan semata karena kehebatan para pemimpinnya, tetapi juga karena adanya jaringan dukungan masyarakat yang bersifat akar rumput. Partisipasi rakyat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Halaban memperkuat legitimasi pemerintahan darurat, baik di mata rakyat sendiri maupun secara simbolik di mata dunia internasional. Keterlibatan Halaban menjadi contoh konkret bagaimana nagari-nagari kecil yang jauh dari pusat kota sesungguhnya memiliki peran vital dalam menjaga kesinambungan negara yang tengah terancam. Inilah wujud dari konsep pertahanan

semesta yang telah lama tumbuh secara alami dalam budaya masyarakat Minangkabau.

Lebih dalam lagi, kehadiran PDRI di Halaban juga memperlihatkan bagaimana tempat-tempat yang tersembunyi justru menjadi titik-titik penting dalam strategi perjuangan. PDRI yang terus bergerak selama lebih dari tujuh bulan dari satu tempat ke tempat lain bergantung pada kemampuan lokal untuk menyediakan ruang aman yang bersifat temporer namun strategis. Halaban, dalam konteks ini, bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang sosial-politik yang menyediakan perlindungan dan loyalitas. Peran semacam ini menantang narasi sejarah konvensional yang seringkali terpusat pada tokoh besar dan lokasi ibu kota, dengan mengabaikan kontribusi desa dan komunitas kecil.

Maka, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perjuangan Halaban dalam sejarah PDRI merupakan representasi dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Wilayah kecil seperti Halaban memiliki makna besar dalam skema pertahanan republik yang bersifat desentralistik dan berbasis

komunitas. Pengakuan atas kontribusi ini penting tidak hanya untuk memperluas perspektif historiografi nasional, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap peran komunitas lokal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Penggalan lebih lanjut terhadap sejarah lisan dan arsip lokal tentang Halaban berpotensi memperkaya pemahaman kita terhadap bagaimana Republik Indonesia bertahan bukan hanya karena pemimpin nasionalnya, tetapi juga karena rakyat kecil yang diam-diam menjaga nyala kemerdekaan di tengah ancaman penjajahan.

E. Kesimpulan

Kisah Nagari Halaban menunjukkan bahwa sejarah besar tidak selalu lahir dari pusat-pusat kota atau medan tempur besar. Dalam senyap dan kesederhanaannya, Halaban menjadi bagian dari denyut nadi Republik yang sedang dilumpuhkan oleh kolonialisme. Keterlibatan Halaban juga merepresentasikan model partisipasi masyarakat lokal yang aktif dan patriotik, yang seharusnya diakui dalam narasi sejarah nasional. Nagari Halaban memiliki kontribusi nyata

terhadap eksistensi PDRI dan, secara lebih luas, terhadap kelangsungan Republik Indonesia pada masa krisis. Peranannya sebagai lokasi singgah, tempat dukungan logistik, dan jalur komunikasi PDRI menunjukkan pentingnya peran nagari dalam perjuangan bangsa. Kajian ini mengingatkan bahwa dalam setiap lembar sejarah perjuangan nasional, terdapat banyak titik kecil yang turut menorehkan peran besar. Mengangkat kembali sejarah Halaban adalah bagian dari merawat ingatan kolektif dan penghormatan terhadap kontribusi masyarakat akar rumput dalam perjuangan kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djajadiningrat, J. (1983). *PDRI dan Perjuangan Pemerintah Indonesia dalam Masa Darurat 1948–1949*. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Djamin, A. (1981). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *PDRI: Menjaga Nyala Republik di Tengah Badai Agresi*. Jakarta: Direktorat Sejarah.
- Kompas Skola. (2020, 8 Maret). *Sejarah dan Peran PDRI*. Kompas.com. Diakses dari

arsip:

<https://web.archive.org/web/20230813093949/https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/08/143000269/sejarah-dan-peran-pdri?page=all>

Mardanas, A. (1997). *Sumatera Barat dalam Perang Kemerdekaan 1945– 1949*. Padang: Universitas Andalas Press.

Wikipedia. (2023). *Halaban, Lareh Sago Halaban, Lima Puluh Kota*. Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Halaban, Lareh Sago Halaban, Lima Puluh Kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Halaban,_Lareh_Sago_Halaban,_Lima_Puluh_Kota)

Fitri, Helma . “Dinas Kebudayaan Sumbang.” *Sumbangprov.go.id*, 2025, disbud.sumbangprov.go.id/details/news/314/menolak-lupa-peran-bukittinggi-dalam-pemerintahan-darurat-republik-ind. Accessed 30 July 2025.

Marbeta, Jhoni. “PDRI Dan Masa Depan NKRI.” *RRI.co.id*, 22 Nov. 2024, rri.co.id/nasional/1199472/pdri-dan-masa-depan-nkri.

Nopriyasman. “JEJAK PERJALANAN SEJARAH PERJUANGAN PDRI PERIODE DESEMBER 1948-MARET 1949.” *Padang, Universitas Andalas*, 9 May 2021, repo.unand.ac.id/41983/1/Nopriyasman-Makalah-Jejak%20Perjalanan%20Sejarah%20PDRI.pdf. Accessed 28 July 2025.